

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KABUPATEN BANTUL**

(Studi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanian
Jurusan Manajemen Pertanian**



Oleh :

SOLEH UMAR SIREGAR
NIM : 06152259

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

INTISARI

Masyarakat nelayan sebagai salah satu pelaku dalam memberdayakan kawasan pesisir masih memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya. Masih terdapat masyarakat yang tidak mampu memberdayakan dirinya untuk meraih kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Tulisan ini disusun dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanahan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bantul**. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat nelayan terhadap pertanahan guna dapat meningkatkan kesejahteraan mereka serta untuk dapat mengetahui bagaimana otoritas pertanahan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menjelaskan dan menginterpretasikan data, sehingga tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dibaca dan dipahami. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Masyarakat nelayan di kabupaten bantul mempunyai potensi-potensi dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, Budidaya ikan didalam kolam maupun di tambak serta lahan pertanian yang bisa dikelola merupakan salah satu cara dalam upaya penganeekaragaman usaha, selain penangkapan ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka guna meningkatkan kesejahteraanya. Masyarakat nelayan berharap otoritas pertanahan di Kabupaten Bantul membuat program sertifikasi hak atas tanah mereka yang di khususkan untuk masyarakat nelayan dengan biaya murah, mereka berharap dengan adanya sertifikasi hak atas tanah mereka menjadi lebih kuat dan dengan adanya sertifikat dapat dijadikan sebagai salah satu akses dalam mendapatkan modal. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah bekerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul berencana akan menggulirkan Program Sertifikasi Tanah yang di khususkan untuk masyarakat nelayan pada tahun 2011. Untuk itu pihak DKP telah melakukan pemberian informasi berupa sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan telah menginventarisir calon peserta program ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR PETA.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Pemberdayaan Masyarakat	7
2. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat	16
3. Kesejahteraan.....	20
4. Sustainable Livelihood Approach.....	26
B. Kerangka Pemikiran	34
C. Batasan Operasional.....	37

BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
	A. Jenis Penelitian.....	39
	B. Lokasi Penelitian	40
	C. Jenis Data dan Sumber Data	41
	D. Teknik Pengumpulan Data	42
	E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	44
	A. Kabupaten Bantul.....	44
	1. Keadaan Fisik Kabupaten Bantul.....	44
	2. Kepadatan Penduduk.....	46
	3. Kondisi sosial ekonomi.....	47
	B. Desa Poncosari.....	48
	1. Letak,Luas dan Batas Daerah.. ..	48
	2. Penggunaan tanah.....	49
	3. Kependudukan.....	50
	C. Desa Parangtritis.....	52
	1. Letak,Luas dan Batas Daerah.	52
	2. Penggunaan tanah.....	52
	3. Kependudukan.....	53
	D. Desa Srigading.....	55
	1. Letak, Luas dan Batas Daerah.. ..	55
	2. Penggunaan tanah.....	56
	3. Kependudukan.....	56
	E. Aspek Pertanahan.....	60
	F. Gambaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	61
	1. Kedudukan,Tugas pokok dan Fungsi.. ..	61
	2. Struktur Organisasi.....	62
	3. Sumber Daya Manusia.....	63

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A.	Masyarakat Nelayan Bantul.....	65
1.	Potensi Masyarakat Nelayan.....	72
2.	Permodalan.....	75
B.	Aspirasi Masyarakat Nelayan.....	77
C.	Peran Otoritas pertanahan.....	81
BAB VI	PENUTUP	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km (www.wikipedia.org). Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya laut yang melimpah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di samping itu berbagai macam jasa yang mendukung usaha kelautan tersebut, seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya menjadikan kawasan pantai menjadi sedemikian penting.

Masyarakat nelayan sebagai salah satu pelaku dalam memberdayakan kawasan pesisir masih memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya. Masih terdapat masyarakat yang tidak mampu memberdayakan dirinya untuk meraih kesejahteraan hidup yang lebih baik. Nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22% dari seluruh penduduk Indonesia justru berada dibawah garis kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 penduduk miskin di

Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47% diantaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan.

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah (Kusnadi, 2006).

Kemiskinan pada masyarakat secara faktual ada dua faktor yang menjadi penyebab, yaitu faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah disebabkan karena fluktuasi musim tangkap ikan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Sementara faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan ikan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran hasil tangkapan dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada.

Salah satu permasalahan mendasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya yang bergerak dalam skala mikro dan kecil, adalah sulitnya akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan formal. Akibatnya para nelayan seringkali terjatoh oleh "rentenir" yang menawarkan pinjaman dengan cepat dan mudah namun diimbangi

dengan tingkat bunga yang tinggi. Akibatnya Nelayan tidak memiliki posisi tawar yang memadai sehingga pendapatan yang diperoleh habis untuk membayar utang dan makan (Puma,2005;5).

Salah satu tujuan pembangunan perikanan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil (*pasal 3*). Lebih lanjut UU Nomor 31 Tahun 2004 juga mengamanatkan pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui penyediaan skim kredit bagi nelayan dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan dan pembudi daya-ikan kecil (*Pasal 60 ayat (1) butir a*).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN mengenai Profil Kemiskinan di Kabupaten Bantul, penduduk miskin di Kabupaten Bantul mencapai 67.589 KK atau sebesar 28.11 % dari jumlah keseluruhan 240.427 KK, menurut pekerjaan dari jumlah penduduk miskin tersebut terdapat pekerjaan Buruh nelayan yang masuk dalam kategori miskin sebanyak 161 KK atau sekitar 0,4 % dari jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan bantuan dari berbagai pihak guna mendorong dan memotivasi para pelaku usaha perikanan skala kecil mengaktualisasi diri secara mandiri dalam penciptaan dan pengembangan

usaha-usaha ekonomi produktif. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui proses sertifikat kepada nelayan dan usaha perikanan skala kecil agar mereka memiliki aset berupa tanah dengan status kepemilikan yang sah serta dapat mendayagunakan aset tersebut sebagai agunan untuk memperoleh modal usaha.

Artikel dari {www.kompas.com, 9 februari 2010} Program-program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah jangan sekadar dianggap proyek yang harus tuntas dalam satu tahun anggaran. Penekanan program ini harus tetap berfokus pada perubahan sikap dan mental masyarakat supaya bisa mandiri untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Seringkali pemberdayaan dari pusat dan daerah untuk mengejar program proyek satu tahun anggaran. Ini membuat program pemberdayaan di banyak daerah gagal.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

([http://Avverous Community@blog](http://AvverousCommunity@blog)).

Pendapat diatas menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dari mulai pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil sampai evaluasi sangat kurang. Dengan adanya pemberdayaan

masyarakat diharapkan bisa menciptakan partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari mulai sadarnya masyarakat akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Adanya suatu pemberdayaan masyarakat dari Kantor Pertanahan diharapkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam segala sesuatu yang menyangkut pertanahan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BANTUL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspirasi masyarakat terhadap otoritas pertanahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana otoritas pertanahan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti peran otoritas pertanahan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta penulis ingin melihat apakah peran yang di harapkan oleh masyarakat nelayan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui aspirasi yang dibutuhkan masyarakat dari otoritas pertanahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya.
- b. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh otoritas pertanahan dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka pengembangan pemberdayaan kemasyarakatan.
- b. Bagi birokrat terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi maupun evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Masyarakat nelayan berharap otoritas pertanahan di Kabupaten Bantul membuat program sertifikasi hak atas tanah mereka yang di khususkan untuk masyarakat nelayan dengan biaya murah, dengan adanya sertifikat maka hak atas tanah mereka menjadi lebih kuat dan dapat dijadikan sebagai salah satu akses dalam mendapatkan modal.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bantul berencana akan menggulirkan Program Sertifikasi Tanah yang di khususkan untuk masyarakat nelayan yang pada tahun 2011. Untuk itu pihak DKP telah memberikan informasi dan menginventarisir calon peserta program ini, dan untuk tahap berikutnya pihak DKP Kabupaten Bantul menunggu tindak lanjut dari DKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. SARAN

1. Agar pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah untuk masyarakat nelayan dapat berjalan dan tepat pada sasaran hendaknya pihak kantor pertanahan juga dapat bekerjasama kepada kelompok-kelompok masyarakat nelayan.
2. Mengingat jumlah masyarakat nelayan di Kabupaten Bantul cukup banyak, hendaknya program sertifikasi ini dapat berkelanjutan sehingga pertanahan dapat berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Bantul dalam Angka*.
- _____, 2009, *Kecamatan Kretek Dalam Angka*
- _____, 2009, *Kecamatan Sanden Dalam Angka*.
- _____, 2009, *Kecamatan Srandakan Dalam Angka*.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- DKP, 2007, *Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantul*, DKP, Bantul, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 2007, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Cet. XXVIII*, Djambatan, Jakarta.
- Hutomo, Mardiyatmo, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Makalah dalam seminar sehari tentang Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas 6 Maret 2000. Jakarta.
- Kartasasmita , Ginanjar 1997 *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat Tidak* Dipublikasikan, Surabaya
- Kusnadi, 2006, *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, LKIS, Yogyakarta
- Makmur Siboro, 2008, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian*, <http://pertanahan.wordpress.com/diklat-pemberdayaan-masyarakat-di-bidang-pertanahan/> diakses tanggal 26 Februari 2010, pukul 20.45
- Nawawi, Hadari 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Najd, E. Shobirin. 2004. *Kegamangan LSM dalam Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Nugroho, Aristiono. 2006, *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis*, Empowerment Of Society Institute, Yogyakarta.

_____, 2010, *Presentasi Modul Pembaharuan Agraria dan UUPA* karya Prof.Dr.Endriatmo Sutarto, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Moleong, Lexy J. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Prijono, Onny S. Dkk. 1996. *Pembardayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* . Penerbit CSIS. Jakarta

Puma, Ibnu. 2005, *Strategi Dan Model Pembiayaan Mikro Bagi Nelayan Kecil*, Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702) Sekolah Pasca Sarjana / S3Program TKL-Khusus, Institut Pertanian Bogor

Riana Faiza 2004, *Kajian Beberapa Aspek Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan Pengolah Muara Angke*”, Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702) Sekolah Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor.

Sebastian Saragih, dkk, *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihoods Framework)* (Hivos-Circle Indonesia,2007) di akses dari www.livelihoods.org dan www.eldis.org, diakses tanggal 09 Maret 2010, pukul 07.34.

Sumodiningrat, Gunawan 2000, *“Pembaharuan Struktur Sosial Desa Sebagai Syarat Kemajuan Desa : Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, dalam Lapera Pustaka Utama (2000), Arus Bawah Demokrasi Otonomi Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati : Sub Ordonansi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Wrihatnolo, Randy R dan Riant N.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta

http://Avverous_Community@blog, *“Pemberdayaan Masyarakat”* diakses tanggal 25 Februari 2010, pukul 23.10

<http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/pengertian-kesejahteraan-sosial/> di akses tanggal 26 Februari 2010, pukul 22.10

www.kompas.com "*Pemberdayaan Masyarakat Jangan Dipandang Proyek*" Kamis, 26 Februari 2009, diakses 22 Februari 2010, pukul 22.21

www.bkkbn.go.id. "*Profil Kemiskinan Masyarakat Bantul*" diakses tanggal 22 Maret 2010, pukul 22.59.

www.wikipedia.org "*Kepulauan Indonesia*" diakses tanggal 20 Februari 2010, pukul 23.30

DAFTAR PERATURAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
6. Keputusan Presiden Nomor 124/2001, jo Keppres Nomor 8/2002, jo Keppres Nomor 34/2002 menetapkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai strategi penanggulangan kemiskinan